

PEMBERDAYAAN SEBAGAI DISIPLIN SOSIAL: PENGALAMAN PEREMPUAN MARGINAL DALAM EKONOMI INFORMAL PERKOTAAN

Syaifudin Suhri Kasim

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email: syaifuddinskasim@uho.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pemberdayaan perempuan marginal perkotaan bukan semata sebagai proses emansipatoris, tetapi sebagai bentuk disiplin sosial yang bekerja melalui mekanisme kebijakan, program ekonomi, dan praktik institusional dalam sektor informal. Berangkat dari perspektif feminis kritis dan teori relasi kuasa, studi ini menganalisis bagaimana diskursus pemberdayaan membentuk subjek perempuan sebagai individu yang “mandiri”, “produktif”, dan “bertanggung jawab” atas kemiskinan mereka sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus pada perempuan pekerja sektor informal di wilayah perkotaan, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa program pemberdayaan; melalui pelatihan kewirausahaan, akses mikro-kredit, dan pendampingan usaha; seringkali mereproduksi logika neoliberal yang menekankan tanggung jawab individual, sementara mengabaikan ketimpangan struktural seperti keterbatasan akses modal, perlindungan sosial, dan ketidaksetaraan gender di pasar kerja. Alih-alih sepenuhnya membebaskan, praktik pemberdayaan tersebut membentuk mekanisme kontrol simbolik yang menormalkan kerja prekar, beban ganda, dan internalisasi etos kerja berbasis survival. Namun demikian, perempuan marginal tidak sepenuhnya pasif; mereka menegosiasikan, mengadaptasi, dan dalam beberapa konteks meredefinisi makna pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan kolektif dan jaringan sosial mereka. Studi ini berkontribusi pada literatur feminis tentang ekonomi informal dengan menunjukkan bahwa pemberdayaan beroperasi sebagai arena ambivalen: sekaligus membuka ruang agensi dan memperkuat disiplin sosial. Dengan demikian, artikel ini menegaskan pentingnya membaca ulang agenda pemberdayaan dalam kerangka keadilan struktural dan transformasi institusional, bukan sekadar peningkatan kapasitas individual.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Perempuan Marginal; Ekonomi Informal; Disiplin Sosial; Relasi Kuasa; Feminisme Kritis.

ABSTRACT

This article examines the empowerment of marginalized urban women not merely as an emancipatory process, but as a form of social discipline operating through policy mechanisms, economic programs, and institutional practices within the informal sector. Drawing upon critical feminist perspectives and theories of power relations, this study analyzes how the discourse of empowerment constructs women as subjects who are expected to be "independent," "productive," and personally responsible for overcoming their own poverty. Employing a qualitative approach with a case study strategy, the research focuses on women working in the urban informal sector. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and policy document analysis. The findings reveal that empowerment programs including entrepreneurship training, access to microcredit, and business mentoring often reproduce a neoliberal logic that emphasizes individual responsibility while overlooking structural inequalities such as limited access to capital, inadequate social protection, and persistent gender disparities in the labor market. Rather than serving solely as instruments of liberation, these empowerment practices function as mechanisms of symbolic control that normalize precarious work, the double burden of productive and reproductive labor, and the internalization of a survival-oriented work ethic. Nevertheless, marginalized women are not merely passive recipients of these interventions. They actively negotiate, adapt, and, in certain contexts, redefine the meaning of empowerment in accordance with their collective needs and social networks. This study contributes to the feminist scholarship on the informal economy by demonstrating that empowerment operates as an ambivalent arena that simultaneously creates opportunities for agency while reinforcing social discipline. Accordingly, the article underscores the importance of rethinking empowerment agendas within a framework of structural justice and institutional transformation, rather than limiting them to the enhancement of individual capacities.

Keywords: Empowerment; Marginalized Women; Informal Economy; Social Discipline; Power Relations; Critical Feminism.

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, wacana pemberdayaan perempuan telah menjadi salah satu pilar utama kebijakan pembangunan global, terutama sejak diarusutamakan agenda kesetaraan gender dalam kerangka United Nations melalui tujuan-tujuan Sustainable Development Goals. Agenda ini menempatkan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai strategi kunci untuk pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan inklusif (Rai, Brown, & Ruwanpura, 2020; Hickel, 2020; Kabeer, 2021). Di tingkat nasional maupun lokal, program pelatihan kewirausahaan, akses mikro-kredit, serta pendampingan usaha bagi perempuan miskin perkotaan dipromosikan sebagai strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi ekonomi dan kemandirian (Cornwall, 2021; Hunt & Samman, 2020; UN Women, 2022). Perempuan marginal, khususnya yang bekerja di sektor informal, dikonstruksi sebagai agen perubahan yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika pasar (Williams & Gurtoo, 2021; Al-Dajani & Marlow, 2021). Namun, di balik narasi optimistik tersebut, berbagai studi menunjukkan bahwa agenda pemberdayaan seringkali beroperasi dalam kerangka rasionalitas neoliberal yang menekankan efisiensi dan tanggung jawab individual (Brown, 2020; Prüggl, 2021; Fraser, 2021).

Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa pemberdayaan bukanlah kategori yang netral atau sepenuhnya emansipatoris. Dalam perspektif feminis kritis dan ekonomi politik feminis, pemberdayaan dapat dipahami sebagai arena diskursif yang membentuk subjek tertentu melalui relasi kuasa yang tidak simetris (Elias & Rai, 2020; Batliwala, 2020). Diskursus “perempuan mandiri” dan “produktif” kerap merepresentasikan pergeseran tanggung jawab struktural dari negara ke individu (Ziai, 2020; Ferguson, 2021). Dalam konteks neoliberal, kemiskinan direduksi menjadi persoalan kapasitas personal, sehingga solusi yang ditawarkan berfokus pada peningkatan keterampilan dan motivasi individu, bahkan transformasi struktur ketimpangan (Molyneux & Razavi, 2020; Roy, 2020; Yusoff, 2020).

Di wilayah perkotaan, sektor informal menjadi ruang utama artikulasi kebijakan pemberdayaan tersebut. Ekonomi informal dicirikan oleh kerja prekar, pendapatan tidak stabil, dan minimnya perlindungan sosial (Meagher, 2021;

Sengupta & Vaitla, 2022). Perempuan bekerja sebagai pedagang kaki lima, pekerja rumahan, buruh lepas, atau pelaku usaha mikro dalam kondisi yang sering kali tidak terlindungi secara hukum (World Bank, 2022; Williams & Gurtoo, 2021). Program pemberdayaan; melalui pelatihan kewirausahaan dan akses mikro-kredit; dirancang untuk mendorong integrasi perempuan ke dalam logika pasar (Taylor, 2021; Hossein, 2021). Namun, penelitian menunjukkan bahwa mikro-kredit dan intervensi berbasis kewirausahaan seringkali berfungsi sebagai mekanisme disipliner yang membebankan risiko ekonomi pada perempuan miskin (Karim, 2020; Gago, 2021).

Bukan berarti sepenuhnya membebaskan, praktik pemberdayaan dapat berfungsi sebagai teknologi pemerintahan (*governmentality*) yang menormalisasi kerja prekar (pekerjaan tidak menentu, sewaktu-waktu, atau tanpa perlindungan sosial) dan etos kerja berbasis survival (Roy, 2020; Ziai, 2020). Perempuan didorong untuk menjadi subjek “bertanggung jawab” yang mengelola risiko secara mandiri dalam konteks restrukturisasi neoliberal (Fraser, 2021; Prügl, 2021). Dalam situasi ini, kerja reproduktif dan beban ganda domestik-publik tetap dilekatkan pada perempuan tanpa dukungan struktural yang memadai (Duffy, Armenia, & Stacey, 2020; Federici, 2022). Dengan demikian, pemberdayaan seringkali mereproduksi kontradiksi antara peningkatan partisipasi ekonomi dan penguatan subordinasi struktural (Chant & Sweetman, 2021; Molyneux & Razavi, 2020).

Menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus pada perempuan pekerja sektor informal di wilayah perkotaan, penelitian ini menggali bagaimana kebijakan pemberdayaan diterjemahkan dalam praktik sehari-hari. Analisis ini memungkinkan pembacaan atas relasi antara struktur dan agensi, khususnya bagaimana perempuan menginternalisasi sekaligus menegosiasikan norma produktivitas yang dilekatkan pada mereka (Tsing, 2021; Elias & Rai, 2020).

Temuan menunjukkan adanya ambivalensi dalam praktik pemberdayaan. Di satu sisi, program-program tersebut membuka akses terhadap jaringan sosial dan sumber daya ekonomi (Kabeer, 2021; Cornwall, 2021). Beberapa perempuan mampu memperluas usaha dan meningkatkan posisi tawar dalam rumah tangga maupun komunitas. Di sisi lain, logika intervensi tetap beroperasi dalam kerangka

individualisasi risiko dan tanggung jawab (Brown, 2020; Ferguson, 2021). Ketimpangan struktural; seperti keterbatasan akses modal skala besar, minimnya perlindungan sosial, dan diskriminasi gender di pasar kerja; cenderung terabaikan (Meagher, 2021; Sengupta & Vaitla, 2022; World Bank, 2022).

Meski demikian, perempuan marginal tidak sepenuhnya pasif. Mereka membangun solidaritas kolektif, memanfaatkan jaringan sosial, dan dalam beberapa konteks meredefinisi makna pemberdayaan sesuai kebutuhan komunitas (Gago, 2021; Batliwala, 2020). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan arena kontestasi yang memperlihatkan ketegangan antara disiplin sosial dan agensi perempuan (Elias & Rai, 2020; Fraser, 2021).

Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada literatur feminis tentang ekonomi informal dengan menegaskan bahwa pemberdayaan beroperasi sebagai proses ambivalen; sekaligus membuka ruang agensi dan memperkuat mekanisme disipliner dalam kerangka neoliberal (Prügl, 2021; Hickel, 2020). Oleh karena itu, agenda pemberdayaan perlu direorientasikan menuju keadilan struktural dan transformasi institusional yang lebih mendasar, bukan sekadar peningkatan kapasitas individual (Kabeer, 2021; Rai et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk menganalisis bagaimana program pemberdayaan membentuk, mendisiplinkan, sekaligus dinegosiasikan oleh perempuan pekerja sektor informal di wilayah perkotaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam atas pengalaman hidup (lived experiences), relasi kuasa, serta proses pembentukan makna yang tidak dapat direduksi menjadi variabel kuantitatif (Denzin & Lincoln, 2021; Creswell & Poth, 2023). Dalam tradisi feminis kritis, metode kualitatif juga dipahami sebagai upaya epistemologis untuk memusatkan suara perempuan marginal serta menantang hierarki produksi pengetahuan (Hesse-Biber, 2021; Naples, 2020).

Strategi studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada konteks spesifik: perempuan pekerja sektor informal yang menjadi peserta program pemberdayaan ekonomi di wilayah perkotaan. Studi kasus memungkinkan analisis

mendalam terhadap dinamika institusional, kebijakan, dan praktik sosial dalam satu setting yang terikat konteks (Yin, 2022; Stake, 2020). Pendekatan ini relevan untuk mengkaji fenomena yang kompleks dan berlapis, khususnya relasi antara kebijakan publik, rasionalitas neoliberal, dan praktik keseharian perempuan di sektor informal.

Penelitian dilakukan di kawasan perkotaan dengan konsentrasi tinggi pekerja perempuan di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pekerja rumahan, buruh lepas, dan pelaku usaha mikro. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) perempuan dewasa, (2) bekerja di sektor informal, dan (3) pernah atau sedang mengikuti program pemberdayaan ekonomi (pelatihan kewirausahaan, mikro-kredit, atau pendampingan usaha). Teknik ini dipilih untuk memastikan partisipan memiliki pengalaman langsung dengan kebijakan yang dianalisis (Patton, 2020). Sebanyak 15 partisipan diwawancarai secara mendalam. Jumlah ini ditentukan berdasarkan prinsip saturation, yaitu ketika data yang diperoleh telah menunjukkan pola tematik yang berulang dan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan (Guest, Namey, & Mitchell, 2020). Dalam pendekatan feminis, pemilihan partisipan juga mempertimbangkan keragaman usia, status perkawinan, jenis usaha, dan durasi keterlibatan dalam program, guna menangkap kompleksitas pengalaman perempuan marginal (Hesse-Biber, 2021).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman subjektif partisipan mengenai makna “kemandirian”, “produktivitas”, dan “pemberdayaan”, dengan memberikan ruang yang fleksibel bagi partisipan untuk mengartikulasikan pengalaman mereka secara reflektif sebagaimana disarankan oleh Brinkmann dan Kvale (2021). Setiap wawancara berlangsung selama 60–90 menit dan direkam atas persetujuan partisipan. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan pada berbagai aktivitas, seperti pelatihan, pertemuan kelompok usaha, dan kegiatan ekonomi sehari-hari, dengan tujuan memahami bagaimana norma produktivitas, disiplin waktu, serta etos kerja dipraktikkan dan

dinegosiasikan dalam interaksi sosial (Emerson, Fretz, & Shaw, 2021). Seluruh hasil observasi didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan (*fieldnotes*) untuk merekam dinamika relasional maupun simbolik yang muncul selama proses penelitian. Penelitian ini juga memanfaatkan analisis dokumen kebijakan yang mencakup modul pelatihan, pedoman program, laporan evaluasi, dan materi promosi resmi guna mengidentifikasi konstruksi diskursif mengenai perempuan sebagai subjek yang “mandiri” dan “bertanggung jawab”, di mana dokumen diperlakukan sebagai teks yang merepresentasikan rasionalitas kebijakan serta teknologi pemerintahan (*governmentality*) yang bekerja melalui bahasa dan kategori administratif (Bowen, 2021).

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik kritis (*critical thematic analysis*) melalui tahapan transkripsi dan familiarisasi data, pengkodean terbuka, pengelompokan kode ke dalam tema-tema utama, serta interpretasi tematik berdasarkan kerangka teori relasi kuasa dan feminisme kritis (Braun & Clarke, 2021). Pendekatan ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi pola pengalaman partisipan, tetapi juga mengungkap bagaimana bahasa, narasi, dan praktik keseharian mereproduksi maupun menegosiasikan logika neoliberal (Elias & Rai, 2020; Prügl, 2021). Untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber melalui perbandingan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen, serta melakukan *member checking* kepada beberapa partisipan agar interpretasi peneliti tetap selaras dengan pengalaman yang mereka sampaikan (Lincoln & Guba, 2020). Di samping itu, reflektivitas peneliti dijaga melalui pencatatan posisi sosial dan asumsi teoretis yang berpotensi memengaruhi proses interpretasi (Finlay, 2021). Penelitian ini juga menjunjung tinggi prinsip etika penelitian sosial dengan memastikan seluruh partisipan menandatangani *informed consent*, memperoleh jaminan anonimitas, dan menggunakan pseudonim untuk melindungi identitas mereka, sejalan dengan prinsip penelitian feminis yang berupaya meminimalkan relasi kuasa antara peneliti dan partisipan serta menghindari reproduksi eksploitasi simbolik (Hesse-Biber, 2021; Orb, Eisenhauer, & Wynaden, 2020). Secara epistemologis, penelitian ini berakar pada paradigma konstruktivis-kritis yang memandang realitas sosial

sebagai hasil konstruksi yang bersifat relasional dan historis (Creswell & Poth, 2023), sehingga pengetahuan tidak dipahami sebagai refleksi objektif atas realitas, melainkan sebagai hasil interaksi antara struktur, diskursus, dan agensi. Dengan landasan tersebut, penelitian ini memungkinkan pembacaan kritis terhadap pemberdayaan perempuan sebagai arena yang bersifat ambivalen, yakni di satu sisi membuka ruang bagi agensi perempuan, namun di sisi lain juga mengoperasikan mekanisme disipliner dalam konteks neoliberalisme (Fraser, 2021; Brown, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi Subjek “Perempuan Mandiri”: Pemberdayaan sebagai Teknologi Disipliner

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi; melalui pelatihan kewirausahaan, akses mikro-kredit, dan pendampingan usaha; tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kapasitas, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan subjek. Dalam modul pelatihan dan sesi pendampingan, perempuan secara konsisten didorong untuk menjadi individu yang “mandiri”, “tangguh”, “produktif”, dan “pantang menyerah”. Kategori-kategori tersebut tidak hadir sebagai deskripsi netral, melainkan sebagai norma moral yang harus diwujudkan dalam praktik keseharian.

Melalui observasi partisipatif, ditemukan bahwa pelatihan menekankan manajemen waktu, efisiensi kerja, pencatatan keuangan yang disiplin, serta komitmen pengembalian pinjaman tepat waktu. Narasi yang dominan menyatakan bahwa keberhasilan usaha sepenuhnya bergantung pada kemauan dan kerja keras individu. Dalam konteks ini, pemberdayaan beroperasi sebagai teknologi pemerintahan (*governmentality*) yang membentuk perempuan sebagai subjek yang menginternalisasi standar produktivitas dan tanggung jawab individual.

Analisis dokumen kebijakan memperlihatkan pergeseran wacana dari “perlindungan sosial” menuju “kemandirian ekonomi”. Negara dan lembaga pelaksana program menempatkan perempuan sebagai aktor ekonomi mikro yang harus mengelola risiko pasar secara mandiri. Dengan demikian, tanggung jawab atas kemiskinan dan kegagalan usaha secara implisit dipindahkan dari struktur

sosial menuju individu. Proses ini memperlihatkan bagaimana rasionalitas neoliberal bekerja melalui bahasa pemberdayaan.

Normalisasi Kerja Prekar dan Beban Ganda

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan bekerja dalam kondisi kerja yang tidak stabil; pendapatan fluktuatif, tanpa jaminan sosial, serta bergantung pada permintaan pasar harian. Namun, alih-alih mempersoalkan kondisi struktural tersebut, program pemberdayaan justru menekankan strategi adaptif individu: diversifikasi usaha, peningkatan jam kerja, atau pengurangan konsumsi rumah tangga saat pendapatan menurun.

Perempuan peserta program seringkali memperpanjang jam kerja hingga larut malam setelah menyelesaikan pekerjaan domestik. Beban ganda; mengelola usaha sekaligus bertanggung jawab atas kerja reproduktif; dianggap sebagai konsekuensi “alami” dari peran mereka. Dalam wawancara, beberapa partisipan menyatakan bahwa mereka merasa bersalah apabila usaha tidak berkembang, meskipun hambatan utama berasal dari keterbatasan modal, akses pasar, atau regulasi yang tidak berpihak pada usaha mikro.

Kondisi ini menunjukkan adanya normalisasi kerja prekar sebagai bagian dari etos pemberdayaan. Perempuan didorong untuk memaknai ketidakpastian sebagai tantangan yang harus diatasi melalui ketekunan pribadi, bukan sebagai persoalan ketimpangan struktural. Dengan demikian, pemberdayaan berfungsi sebagai mekanisme kontrol simbolik yang menginternalisasi logika survival sebagai bentuk keberhasilan.

Mikro-Kredit dan Individualisasi Risiko

Skema mikro-kredit menjadi salah satu instrumen utama program pemberdayaan. Akses terhadap pinjaman memang membuka peluang ekspansi usaha bagi sebagian partisipan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa risiko kegagalan usaha sepenuhnya dibebankan kepada individu peminjam. Tidak terdapat mekanisme perlindungan yang memadai ketika usaha mengalami kerugian akibat faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan baku atau penurunan daya beli konsumen.

Beberapa partisipan melaporkan tekanan psikologis akibat kewajiban pengembalian pinjaman yang ketat. Dalam konteks ini, mikro-kredit tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai instrumen disiplin finansial yang mengatur perilaku ekonomi perempuan. Risiko yang sebelumnya bersifat struktural; seperti volatilitas pasar diterjemahkan menjadi tanggung jawab moral individu untuk tetap “bertahan” dan “kreatif”.

Fenomena ini memperkuat temuan bahwa pemberdayaan dalam praktiknya mereproduksi individualisasi risiko. Perempuan tidak hanya dituntut produktif, tetapi juga resilien dalam menghadapi ketidakpastian sistemik tanpa dukungan struktural yang memadai.

Ambivalensi Pemberdayaan: Ruang Agensi dan Negosiasi

Meskipun praktik pemberdayaan memperlihatkan dimensi disipliner yang kuat, penelitian ini juga menemukan bahwa perempuan marginal tidak sepenuhnya pasif. Mereka menegosiasikan makna pemberdayaan sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan kolektif mereka. Beberapa partisipan membentuk jaringan solidaritas informal untuk saling membantu dalam pemasaran produk, berbagi informasi harga bahan baku, atau mengatur sistem arisan sebagai mekanisme penyangga risiko. Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak dimaknai semata sebagai keberhasilan individu, tetapi sebagai kapasitas kolektif untuk bertahan dan saling mendukung.

Selain itu, sebagian perempuan secara reflektif mengkritisi narasi “kemandirian total” yang dipromosikan dalam pelatihan. Mereka menyadari bahwa keberhasilan usaha sangat bergantung pada faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, akses ruang publik, dan kondisi pasar. Kesadaran ini menunjukkan adanya ruang agensi yang tidak sepenuhnya terserap dalam logika neoliberal.

Dengan demikian, pemberdayaan beroperasi sebagai arena ambivalen: di satu sisi memperluas akses terhadap sumber daya dan jaringan, di sisi lain memperkuat mekanisme disipliner yang menormalisasi kerja prekar dan individualisasi tanggung jawab.

Implikasi Teoretis: Membaca Ulang Pemberdayaan dalam Kerangka Keadilan Struktural

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan tidak dapat direduksi menjadi dikotomi emansipasi versus dominasi, melainkan merupakan konfigurasi relasional antara agensi perempuan dan struktur kebijakan yang dibentuk oleh rasionalitas ekonomi neoliberal. Perspektif ini sejalan dengan argumen Srilatha Batliwala (2020) yang menegaskan bahwa pemberdayaan selalu berkaitan dengan dinamika kuasa dan pembentukan subjek. Namun, berbeda dari pendekatan yang melihat pemberdayaan terutama sebagai ekspansi kapasitas individu, studi ini menunjukkan bagaimana praktik pemberdayaan juga memproduksi norma tanggung jawab individual atas kemiskinan; sebuah proses yang dikritik oleh Wendy Brown (2020) dalam *Theory & Event* sebagai konsekuensi rasionalitas neoliberal yang merombak makna sosial menjadi kalkulasi ekonomi.

Dalam konteks ekonomi informal, hasil ini mengonfirmasi temuan Naila Kabeer (2021) bahwa pemberdayaan ekonomi memang dapat memperluas akses sumber daya, tetapi tidak otomatis mengubah struktur ketimpangan. Kritik terhadap agenda “*smart economics*” juga telah dikemukakan oleh Sylvia Chant dan Caroline Sweetman (2021), yang menunjukkan bahwa fokus pada efisiensi ekonomi sering kali mengabaikan transformasi relasi gender. Sejalan dengan itu, penelitian tentang mikrofinans oleh Lamia Karim (2020) dan Milford Bateman Taylor (2021), yang menyoroti bagaimana skema kredit dapat mendisiplinkan perempuan melalui internalisasi risiko pasar.

Namun demikian, berbeda dari pembacaan yang terlalu deterministik terhadap neoliberalisasi feminisme (Prügl, 2021), studi ini menemukan bahwa perempuan marginal tidak sepenuhnya terserap dalam logika tersebut. Mereka membangun solidaritas dan praktik negosiasi sehari-hari yang mencerminkan apa yang oleh Anna Tsing (2021) disebut sebagai “*survival economies*”. Di sini, pemberdayaan menjadi arena kontestasi: ia memproduksi subjek yang diharapkan resilien dan produktif, tetapi sekaligus membuka ruang resistensi mikro dalam praktik kolektif.

Secara teoretis, integrasi temuan ini dengan ekonomi politik feminis; seperti dirumuskan oleh Jacqui True Elias dan Shirin M. Rai (2020), menegaskan bahwa analisis pemberdayaan harus melampaui indikator pendapatan menuju relasi kuasa dan distribusi risiko. Secara kebijakan, hal ini menguatkan argumen UN Women (2022) bahwa reformasi perlindungan sosial dan regulasi pasar kerja inklusif merupakan prasyarat agar pemberdayaan tidak berhenti pada adaptasi individual, tetapi bergerak menuju keadilan struktural.

Dengan demikian, studi ini memperluas literatur dengan menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan di sektor informal harus dibaca sebagai proses ambivalen: ia berpotensi emansipatoris, tetapi hanya menjadi transformasional apabila disertai perubahan institusional yang mendasar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan marginal di wilayah perkotaan tidak dapat direduksi sebagai sekadar upaya pembebasan ekonomi. Berdasarkan temuan kualitatif terhadap perempuan pekerja sektor informal, pemberdayaan tampak sebagai praktik yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, program-program tersebut membuka peluang akses terhadap modal, jaringan sosial, dan kesempatan usaha. Di sisi lain, pemberdayaan juga berfungsi sebagai mekanisme yang menanamkan tanggung jawab individual atas kondisi kemiskinan dan kerentanan yang sesungguhnya bersifat struktural.

Pelatihan kewirausahaan, skema mikro-kredit, dan pendampingan usaha memang memberikan ruang bagi peningkatan kapasitas ekonomi. Namun, intervensi tersebut kerap dibingkai dalam logika neoliberal yang memindahkan risiko sosial-ekonomi dari negara dan pasar kepada individu. Kemiskinan dipersempit menjadi persoalan kurangnya kompetensi atau etos kerja, sementara persoalan mendasar seperti keterbatasan akses terhadap modal besar, lemahnya perlindungan sosial, dan ketidaksetaraan gender dalam pasar kerja cenderung terabaikan. Akibatnya, kerja prekar dan beban ganda domestik-publik menjadi kondisi yang dinormalisasi, bahkan dipandang sebagai bagian dari komitmen moral untuk “bertahan” dan “mandiri”.

Meski demikian, perempuan tidak sepenuhnya tunduk pada kerangka tersebut. Mereka menunjukkan agensi melalui praktik negosiasi, solidaritas kolektif, dan strategi adaptif untuk memperluas ruang otonomi. Dengan demikian, pemberdayaan menjadi arena kontestasi antara disiplin sosial dan potensi transformasi. Secara konseptual, studi ini menekankan perlunya membaca ulang pemberdayaan dalam perspektif relasi kuasa dan keadilan struktural, agar kebijakan tidak berhenti pada penguatan kapasitas individu, melainkan mendorong perubahan institusional yang lebih mendasar dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dajani, H., & Marlow, S. (2021). Women's entrepreneurship in constrained contexts. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 45(3), 532–556. <https://doi.org/10.1177/1042258720907603>
- Batliwala, S. (2020). All about power: Understanding social power and power structures in women's empowerment. *Development and Change*, 51(4), 1025–1048. <https://doi.org/10.1111/dech.12598>
- Bowen, G. A. (2021). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 21(2), 135–150. <https://doi.org/10.1108/QRJ-D-20-00008>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Brinkmann, S., & Kvale, S. (2021). *Doing interviews* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Brown, W. (2020). Neoliberal rationality and the remaking of the social. *Theory & Event*, 23(2), 333–352. <https://doi.org/10.1353/tae.2020.0018>
- Chant, S., & Sweetman, C. (2021). Fixing women or fixing the world? Smart economics, efficiency approaches, and gender equality. *Gender & Development*, 29(1), 23–42. <https://doi.org/10.1080/13552074.2021.1885216>
- Cornwall, A. (2021). Women's empowerment: What works and why? *Journal of International Development*, 33(4), 587–604. <https://doi.org/10.1002/jid.3540>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2021). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Duffy, M., Armenia, A., & Stacey, C. (2020). Caring on the clock: Gender, care work and neoliberal reform. *Gender & Society*, 34(1), 30–57. <https://doi.org/10.1177/0891243219883587>
- Elias, J., & Rai, S. (2020). Feminist everyday political economy: Space, time, and violence. *Review of International Political Economy*, 27(5), 1049–1072. <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1675743>
- Emerson, R. M., Fretz, R. I., & Shaw, L. L. (2021). *Writing ethnographic fieldnotes* (3rd ed.). University of Chicago Press.

- Federici, S. (2022). Reproductive labour and neoliberal restructuring. *Radical Philosophy*, 2(10), 15–28.
- Ferguson, J. (2021). The uses of neoliberalism. *Antipode*, 53(2), 420–439. <https://doi.org/10.1111/anti.12674>
- Finlay, L. (2021). The ‘good’, the ‘bad’ and the ‘ugly’ of thematic analysis. *European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy*, 11, 103–116.
- Fraser, N. (2021). Feminism, capitalism, and the cunning of history revisited. *New Left Review*, 129, 55–78.
- Gago, V. (2021). Feminist economics and popular economies. *South Atlantic Quarterly*, 120(4), 789–805. <https://doi.org/10.1215/00382876-9443186>
- Guest, G., Namey, E., & Mitchell, M. (2020). *Collecting qualitative data: A field manual for applied research*. SAGE Publications.
- Hesse-Biber, S. N. (2021). *The practice of feminist research: Power, knowledge and reflexivity* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Hickel, J. (2020). The sustainable development goals and neoliberal development. *World Development*, 127, 104–116. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104718>
- Hossein, C. (2021). Microfinance and the gendered burden of responsibility. *Development Policy Review*, 39(3), 412–430. <https://doi.org/10.1111/dpr.12509>
- Hunt, A., & Samman, E. (2020). Women’s economic empowerment: Navigating enablers and constraints. *World Development*, 127, 104–113. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104811>
- Kabeer, N. (2021). Women’s economic empowerment and inclusive growth. *Feminist Economics*, 27(1–2), 1–34. <https://doi.org/10.1080/13545701.2020.1843390>
- Karim, L. (2020). Microfinance and the disciplining of women. *Cultural Anthropology*, 35(2), 173–197. <https://doi.org/10.14506/ca35.2.02>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2020). *Naturalistic inquiry* (35th anniversary ed.). SAGE Publications.
- Meagher, K. (2021). Informal economies and precarious livelihoods. *Journal of Development Studies*, 57(8), 1250–1266. <https://doi.org/10.1080/00220388.2020.1868535>
- Molyneux, M., & Razavi, S. (2020). Gender, poverty and social policy in neoliberal contexts. *Social Politics*, 27(3), 405–428. <https://doi.org/10.1093/sp/jxaa015>
- Naples, N. A. (2020). Feminist methodology. In G. Ritzer (Ed.), *The Blackwell encyclopedia of sociology* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Orb, A., Eisenhauer, L., & Wynaden, D. (2020). Ethics in qualitative research. *Journal of Nursing Scholarship*, 52(1), 4–9. <https://doi.org/10.1111/jnu.12536>
- Patton, M. Q. (2020). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Prügl, E. (2021). Neoliberalising feminism. *European Journal of Politics and Gender*, 4(1), 35–51. <https://doi.org/10.1332/251510820X15923415845512>

- Rai, S., Brown, B., & Ruwanpura, K. (2020). SDGs and the gendered political economy of development. *Globalizations*, 17(3), 489–505. <https://doi.org/10.1080/14747731.2019.1659897>
- Roy, A. (2020). Poverty governance and the entrepreneurial subject. *Geoforum*, 111, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.02.005>
- Sanyal, K. (2020). Rethinking capitalist development and informality. *Economic and Political Weekly*, 55(12), 45–53.
- Sengupta, S., & Vaitla, B. (2022). Informality and gendered precarity. *World Development*, 150, 105–120. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105715>
- Stake, R. E. (2020). Qualitative case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Taylor, M. (2021). The political economy of microfinance. *Development and Change*, 52(6), 1340–1362. <https://doi.org/10.1111/dech.12665>
- Tsing, A. (2021). Precarity and survival economies. *Cultural Anthropology*, 36(2), 261–286. <https://doi.org/10.14506/ca36.2.05>
- UN Women. (2022). Women's economic empowerment in the informal economy. *Gender & Development*, 30(2), 211–228. <https://doi.org/10.1080/13552074.2022.2075284>
- Williams, C., & Gurtoo, A. (2021). Informal entrepreneurship and gender inequality. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 41(7–8), 679–695. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2020-0476>
- World Bank. (2022). Women, business and the law and informal work. *World Development*, 154, 105–118. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105794>
- Yin, R. K. (2022). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yusoff, K. (2020). Dispossession and neoliberal governance. *Environment and Planning D: Society and Space*, 38(6), 1020–1037. <https://doi.org/10.1177/0263775820908447>
- Ziai, A. (2020). Development discourse and the production of responsible subjects. *Third World Quarterly*, 41(10), 1759–1776. <https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1748302>